

ANALISIS

Oleh Nur Hidayat Sardini

Menang dan Kalah
Menurut Manusia Jawa

RABU (27/6) ini digelar pilkada di 171 daerah di Indonesia, terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dibandingkan 2015 dan 2017, pilkada kali ini dinilai memiliki posisi strategis.

Bukan hanya jumlah pemilih yang gemuk, yakni 152.066.686 dari jumlah pemilih Pemilu 2019 sebanyak 196.545.636 orang, namun juga karena berdekatan dengan Pileg dan Pilpres 2019.

Pilkab Jateng 2018 juga strategis. Pertama, jumlah pemilih 27.555.487 orang tergolong besar, masuk dalam kategori papan atas bersama Jawa Barat (33.138.630), Jawa Timur (31.312.285), dan Su-

matera Utara (10.763.893).

Kedua, dalam perspektif geopolitik, pemilih di Jawa Tengah adalah penentu konstelasi politik nasional. Banyak pihak berpandangan, Pilgub Jateng akan berlangsung lebih dinamis.

Selain luberan citra Pilgub DKI Jakarta 2017, juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk partai politik yang selama ini dinilai dominan.

Komposisi perolehan suara Pemilu 2014 memperlihatkan, PDI Perjuangan meraup suara terbanyak dan mendudukkan 31 legislator di DPRD Jateng.

(Bersambung hlm 7 kol 1)

Menang....

(Sambungan hlm 1)

Menjelang pilgub, sebagian kelompok mengharapkan PDIP akan menghadapi lawan tanding yang setara. Harapan kelompok ini tidak meleset, karena Ganjar Pranowo dan Taj Yasin ditantang Sudirman Said dan Ida Fauziah yang diusung oleh partai politik dengan haluan sebagaimana Pilgub DKI 2017.

Sebagian besar dinamika politik sebagaimana harapan sebagian kelompok itu terbukti di lapangan. Dalam tiga kali debat yang digelar oleh KPU Jateng, kandidat penantang telah berusaha mengangkat isu-isu yang menjadi kelemahan pembangunan oleh petahana.

Pasangan calon penantang juga telah berusaha melakukan kampanye kritis terhadap apa yang (pemah) dikerjakan oleh petahana. Secara teori, penantang hanya paling mungkin untuk menjanjikan sesuatu yang dinamakan "janji-janji besar" (*possess great promise*) meminjam istilah Morton & Cameron (1992).

Pada bagian lain, petahana telah berusaha mengimbangi penantang dengan tak kalah lihai. Dalam debat putaran pertama, petahana tampak mengikuti permainan oleh petahana, sedangkan dalam debat putaran kedua, petahana mulai memperbaiki performa debat.

Dalam debat ketiga, petahana menemukan performa terbaiknya. Seiring dengan langkah-langkahnya di panggung debat, intensitas dan frekuensi petahana makin menguatkan posisi defensivitas yang baik, demi menghadapi dan mengimbangi tematika dan isu serta strategi penantang.

Secara teori, petahana hanya paling mungkin untuk bersikap defensif dalam menghadapi kinerja kampanye penantang (*incumbent are only most likely to be defensive in the face of challenger campaign perform-*

ance) masih meminjam pengertian Morton & Cameron (1992).

Dasar-dasar pertimbangan pemilih dalam memilih kandidat terbagi ke dalam tiga model. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan siapa yang akan memenangkan pilgub kali ini. Pertama, model sosiologis (*sociological model*).

Secara teori model ini menyatakan, seseorang memilih kandidat dengan pertimbangan apakah memikirkan dan memiliki perhatian yang besar terhadap kepentingan pemilih dan masyarakat.

Pertanyaan mereka, apakah kandidat menentukan kebijakan-kebijakan yang pro-publik dan memiliki orientasi terhadap semua warga negara, termasuk pemilih.

Orang yang memiliki kesadaran biasanya orang yang relatif berpendidikan, sehingga dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan, mereka yang berpendidikan lebih mungkin untuk memilih kandidat yang peduli terhadap kepentingan sosial.

Selain pendidikan, jenis pekerjaan juga menentukan pertimbangan warga pemilih. Orang yang bekerja di sektor yang lebih rentan terhadap kebijakan pemerintah cenderung dalam kualifikasi tersebut, ketimbang sebaliknya.

Kedua, model psikologis (*psychological model*). Model ini sebagai kritik terhadap model sosiologis, karena belum tentu pemilih yang memiliki tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan serta berlatar belakang primordialisme dengan sendirinya akan memilih kandidat dengan latar belakang-latar belakang tersebut.

Model psikologis mengintroduksi budaya demokrasi (*culture of democracy*), dengan asumsi bahwa dorongan seseorang untuk memilih dalam pemilu adalah karena kedekatan dengan partai atau kandidat tertentu, informasi cukup mengenai dunia pemilu, dan merasa bahwa hak untuk memilih kandi-

dat yang dimilikinya cukup berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat memperbaiki keadaan. Dengan kata lain, orang menentukan pilihan karena tersedianya informasi, pengetahuan, dan ketertarikan politik (*political interest*), hasrat diri untuk memperbaiki keadaan (*self-efficacy*), dan identitas partisipan dalam politik (*political partisanship*), dengan harapan kandidat akan menguntungkan dirinya secara pribadi.

Basis konsep model ini juga terletak pada tiga hal, yakni identifikasi partai, preferensi isu, dan persepsi terhadap calon. Ketiga, model rasional (*rational model*). Model ini menjelaskan bahwa seseorang memilih atau tidak memilih calon dalam pemilu berdasarkan pertimbangan olahan logika yang dimilikinya.

Sikap mereka terhadap pilihan adalah berdasarkan pertimbangan rasional. Sebagaimana teori *rational choice*, maka memilih dan tidak memilih sama saja.

Tidak Konsisten

Namun pertimbangan utama andai seseorang memilih adalah semata kondisi ekonomi politik, yang merupakan inti model pilihan rasional. Dalam perspektif ini, hasil pemilu adalah barang publik (*public goods*), yakni siapa pun yang menjadi pemimpin atau kebijakan apa pun yang akan dibuat, tidak seorang pun yang akan memperoleh lebih banyak atau lebih sedikit secara pribadi, berapa pun sumbangsinya bagi pembentukan barang publik tersebut.

Warga negara yang ikut atau tidak dalam pemilu, hasilnya akan sama saja bagi dirinya. Artinya, tanpa bertindak apa-apa, mereka akan tetap dapat menikmati barang publik yang kurang lebih sama dengan orang yang berbuat. Orang memilih atau tidak dalam pemilu, akan sama memiliki pemimpin politik atau parpol pemenang. Secara rasional, mengapa harus harus lelah-lelah mengikuti pemilu kalau orang yang tak mengeluarkan tenaga dan

waktu dan mendapatkan hasil yang sama dengan yang menggunakan tenaga dan waktunya untuk proses pemilihan tersebut.

Catatan penting pemilih untuk memilih kandidat berada dalam ketiga dasar-dasar pertimbangan di atas. Kendati demikian, pertimbangan di atas selalu tidak konsisten. Artinya, mereka memilih bukan dengan satu pertimbangan, namun dapat dengan dua bahkan tiga pertimbangan secara sekaligus.

Pemilih di Jawa Tengah dalam pilgub kali ini saya perkirakan juga dengan latar pertimbangan dimaksud. Namun, hal yang kurang dan di luar pertimbangan di atas namun juga penting adalah aspek-aspek kultural.

Secara kultural masyarakat Jawa di provinsi ini relatif majemuk. Terdapat pola-pola budaya yang memuat gambaran dualitas di antara elemen-elemennya. Dualitas yang mengancam dibentuk dari proses sosio-historis cukup lama hingga membentuk dualisme dalam berbagai pola budaya.

Dalam dualisme budaya, orang Jawa Tengah mengutamakan harmoni sosial. Dalam konsep ini, ajaran Jawa mengenalkan *memayu hayuning bawono*, yakni perilaku atau watak manusia Jawa yang berusaha mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dunia (*wong Jawa sing nggoleki rasa seneng, kamakmuran lan kaslametan ing donya*). (Endraswara, 2003).

Orang yang mengutamakan keharmonisan sosial dianggap oleh sebagian besar orang sebagai bagian dari sikap dan perilaku yang menentang arus. Orang dengan karakter tersebut mengutamakan kedinamisan dan dianggap sebagai konflikualitas.

Bagi sebagian manusia Jawa, orang kritis adalah penampil dari perilaku dan watak jahil, dianggap sebagai sikap yang menyalahkan saudaranya, bagian dari iri dengki, dan orang yang dinilai berbuat sekehendak hati tanpa menghargai jasa dan kebaikan orang lain.

Saya menduga, mengapa debat kandidat

yang digelar oleh KPU Jawa Tengah tempo hari para calon relatif hati-hati, bahkan sebagian besar tidak agresif—sebagaimana debat kandidat di Jawa Timur dan Jawa Barat—dilatarbelakangi oleh kehati-hatian sikap supaya tidak dianggap melawan arus utama (*mainstreaming*) terhadap langgam budaya Jawa ini.

Seusai pilgub, kondisi Jawa Tengah tetap akan kondusif. Siapa pun pemenang, akan dihadapkan pada langgam keselarasan sosial. Perkiraan saya, setelah pilgub, pemenang akan leluasa yang ditandai tanpa gugatan, seperti pilgub lima tahun yang lalu.

Pemenang akan jadi pemenang yang baik (*a good winner*), dan pihak yang kalah akan jadi pecundang yang budiman (*a good loser*). Selama pemilihan, yang berlangsung tidak sedinamis yang saya perkirakan pada awal-awal pilgub, akan berada dalam buduk dan harapan yang sama. Mereka akan kembali menuju ke pulau impian di mana terdapat kehidupan surgawi dunia bersama, dalam pandangan pandangan orang Jawa.

Ini karena sekali lagi, dalam budaya Jawa, tidak ada yang disebut pemenang sejati, dan juga tidak dikenal pihak yang kalah—sebagaimana *sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bala, lan menang tanpa ngasorake*. Tantangan terbesar justru berada di tangan pemenang apabila tidak menepati janji-janji yang pernah diucapkan.

Pemimpin sejati dalam konsep kepemimpinan Jawa pantang cedera janji. Dalam ungkapan Ki Ageng Suryamentaram (1892-1962), *"Manawa ing prasetya sing dipasrahi kanthi senggaja nalika dheweke nampa tugas, utamane janji sing digawe kanggo wong langsung liwat basa dhewe."* Dalam ungkapan lain, *pemimpin itu "Pangawikan pribadi, kawruh pamomong, lan pageming gesang."* (19)

—Dr Nur Hidayat Sardini, SSos, MSI,
Ketua Asosiasi Ilmu Politik (AIP) Semarang